

# **KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PELACURAN**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004. menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Pembongkaran yang dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan penertiban di gunung sampan (GS) tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran sesuai pada pasal 4, hal ini dikarenakan terdapat berbagai masalah baik dari pihak berwenang ataupun dari pihak yang melakukan praktek prostitusi di gunung sampan (GS).

Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum pernah melakukan pembongkaran bangunan tersebut, seharusnya Pemerintah Situbondo melakukan penertiban hingga sampai pada proses pembongkaran agar para pekerja prostitusi pada gunung sampan (GS) tidak bertahan pada tempat tersebut, maka dari itu sebagai tempat prostitusi khususnya pada lokasi gunung sampan (GS) harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah, pembongkaran bangunan, tempat pelacuran

*AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF SITUBONDO DISTRICT IN THE  
BUILDING OF BUILDING USED AS A PLACE OF PREVENTION*

*ABSTRACT*

*This thesis discusses the Authority of the Government of Situbondo Regency in the demolition of the building which is used as a place of prostitution. The purpose of research To find out how the authority of the District Government Situbondo in dismantling the building used as a place of prostitution according to Article 4 paragraph 2 of Regional Regulation No. 27 of 2004. using normative research with the approach of legislation. Researchers use descriptive research method. The demolition as one of the ways to control the mountain sampan (GS) does not run in accordance with Local Regulation number 27 of 2004 on prohibition of prostitution according to Article 4, this is because there are various problems either from the authorities or from the practitioner prostitution in the mountain of the canoe (GS).*

*So far, the Situbondo regency government has never done the demolition of the building, should the Government of Situbondo conduct curbing up to the demolition process so that the prostitution workers on the mountain sampan (GS) do not survive in that place, therefore as a place of prostitution, especially at the location of the mountain sampan GS) shall be dealt with strictly by the appropriate authorities as mandated by Regional Regulation of Situbondo Regency Number 27 of 2004 on prohibition of prostitution.*

*Keywords: Government Authority, Building Demolition, Brothel*